



RENJA

TAHUN
2023

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Rakhmat dan Hidayah serta bimbingan-Nya maka Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan dan disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan kondisi, permasalahan dan kebutuhan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta sebagaiupaya mendukung visi Gubernur Sulawesi Tengah serta mewujudkan pencapaian penurunan kemiskinan dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui peningkatan kesetaraan gender disegala bidang kehidupan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023 diharapkan dapat menjadi implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 Provinsi Sulawesi Tengah.

Atas kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, diucapkan terima kasih.

Palu, 27 April 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. ZUBAIR, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19701009 199003 1 003

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	1
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penyusunan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	7
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan OPD	23
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	26
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	27
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	58
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas	58
3.3.	Program dan Kegiatan Dinas	62
BAB IV	PENUTUP	90

Daftar tabel

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Tengah	9
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2022	24
Tabel 2.3.	Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah	29
Tabel 3.1.	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah	60
Tabel 3.2.	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah	63

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Pemerintah Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diamanatkan dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa hal yang mendasar dalam kebijakan ini adalah untuk “Memberdayakan Perempuan dan Perlindungan Anak“ dengan menumbuhkembangkan dan mendorong prakarsa, kreativitas serta meningkatkan partisipasi swadaya perempuan dalam proses pembangunan sehingga tercipta hubungan yang seimbang dan selaras antara pelaksanaan kebijakan otonomi Daerah dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan kebijakan tersebut diatas serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan.

Pelaksanaan program/Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun berdasarkan pada keadaan, kondisi, permasalahan, potensi, dan kebutuhan Daerah yang tercermin dalam visi, misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA dan RENJA OPD dengan harapan dapat mewujudkan capaian visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan daerah Tingkat I Sulawesi Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemeirntah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi;
 19. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005- 2025 (lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026;

21. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah.
22. Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah bagi pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan dengan penetapan prioritas program dan kegiatan sebagai agenda tahunan guna mewujudkan pencapaian serta mendukung visi dan misi Gubernur Kepala Daerah terpilih dalam mewujudkan pencapaian target pembangunan di daerah .

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Program/Kegiatan Dinas Pemberdayan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi dalam rangka mewujudkan Kualitas Perempuan dan Anak yang maju, mandiri dan berdaya saing, serta tercapainya suatu masyarakat yang adil, aman damai dan sejahtera lahir batin di daerah Sulawesi Tengah.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan operasional pelaksanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sulawesi Tengah.

1.4. Sistematik Penyusunan

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematik Penyusunan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal OPD
- 2.5. Penetapan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terjadinya Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV. PENUTUP

Daftar tabel

- Tabel. 2.1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022
Provinsi Sulawesi Tengah.....
- Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD- DP3A Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2022.....
- Tabel 2.3. Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi
Sulawesi Tengah.....
- Tabel 3.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi
Sulawesi Tengah.....
- Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2023 dan
Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 mempunyai fungsi membantu Gubernur dalam urusan wajib non pelayanan dasar di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan memperhatikan fungsi tersebut mempunyai kewajiban dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pembangunan di daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui alokasi dana APBD Provinsi Sulawesi Tengah. Pelaksanan pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang melalui proses perencanaan dengan mempertimbangkan keadaan, kondisi, permasalahan, potensi, dan kebutuhan daerah untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Guna terwujudnya misi pemerintah daerah maka perlunya perencanaan yang sistematis, transparansi dan akuntabel serta dapat terukur pencapaiannya. Dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman pada OPD Sulawesi Tengah dan RENSTRA- OPD tahun 2021-2026 sebagaimana yang dituangkan melalui Rencana Kerja (RENJA) Tahunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai urusan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sebagai upaya pencapaian target Rencana Kerja (RENJA) tahunan OPD harus dilakukan evaluasi pencapaian kinerjanya setiap tahun berjalan. Adapun hasil evaluasi kinerja pelayanan tahun 2022 sebagai berikut:

1. Tingkat Realisasi capaian program/Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan
2. Tingkat Realisasi capaian program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan

4. Implementasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Untuk melihat hasil evaluasi tingkat capaian kinerja program/kegiatan berdasarkan rencana kerja OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada uraian rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD pada tabel. 2.1

Tabel. 2.1

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN 2022
PROVINSI SULAWESI TENGAH

	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERITAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD 2022			APBD 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD 2022			PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD 2022				
			K		Rp		K		Rp	K	Rp			
B														
2	8	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip OPD									
2	8	01		Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah										
2	8	01	101	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dok	30,000,000	31,444,550	1	Dok	31,444,550	100	100
2	8	01	102	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dok	30,000,000	21,999,775	3	Dok	21,999,775	100	100
2	8	01	103	6	Koordinasi dan Penyusunan LapCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dok	10,000,000						
2	8	01	104	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dok	250,696,697	387,292,425	1	Dok	387,255,965	100	99,99

2	8	01	102		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
2	8	01	102	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12	Laporan	9,087,753,733	8,607,165,344	12	Lap	7,896,344,835	100	91,74
2	8	01	102	2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Laporan	798,400,000	1,654,108,000	12	Lap	1,648,684,000	100	99.67
2	8	01	102	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan atas LHP	1	Dok	11,090,000	10,345,600	1	Dok	10,266,775	100	99,24
2	8	01	102	7	Koordinasi dan penyusunan Lap keuangan bulanan/triwula/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	2	Lap	14,486,422	22,862,000	2	Lap	22,460,300	100	98.24
2	8	01	102	8	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran				33,800,000	50,000,000			50,000,000	100	100
2	8	01	105		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
2	8	01	105	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	138	Orang	68,000,000	20,098,650	138	Orang	19,890,000	100	98.96
2	8	01	106		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah										
2	8	01	106	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	1	Paket	2,484,026						
2	8	01	106	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan, cetak dan penggandaan	1	Paket	134,835,422	24,876,815	12	Bulan	24,867,275	100	99.96

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2	8	01	106	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rakor dan konsultasi SKPD	2	Laporan	279,383,184	431,569,800	2	Laporan	429,031,139	100	99.41
2	8	01	107		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah										
2	8	01	107	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	1	unit	435,000,000	0			0		0
2	8	01	107	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan	1	Paket	15,000,000	644,330,216	1	Paket	642,013,858	100	99,64
2	8	01	108		Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah										
2	8	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Pengiriman Dokumen	1	Paket	20,000,000	25,030,000	1	Paket	24,812,305	100	99.13
2	8	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	161,700,000	114,834,400	12	Bulan	102,617,300	100	89.36
2	8	01	108	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa	1	Paket	80,000,000	55,028,125	1	Paket	53,404,215	100	97.05
2	8	01	108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	1	Paket	289,009,365	172,115,460	1	Paket	168,865,454	100	98.11
2	8	01	109		Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah										
2	8	01	109	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Jasa	1	Paket	13,000,000	20,000,000	1	paket	13,290,400	100	66.45
2	8	01	109	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Peizinan kendaraan dinas atau Lapangan	Jumlah Jasa	1	Paket	230,622,000	291,609,800	1	Paket	291,535,000	100	99.97

2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)								
2	08	02	101		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Termanfaatkannya dokumen pelembagaan pengarusutamaan gender								
2	08	02	101	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan Pelaksanaan PUG, Jumlah peserta pelatihan pendampingan pelaksanaan PUG dan PPRG	1 110	Dokumen Orang	150,000,000	219,991,750	1 110	Dokumen Orang	212,979,340	100 96.81
2	08	02	101	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG dan PPRG	2	Kebijakan	75,000,000	657,100,875	13	Kab/Kota	636,361,875	100 96.84
2	08	02	101	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan	110	Orang	250,000,000	53,508,000	110	Orang	50,793,000	100 94.93
2	08	02	102		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi									
2	08	02	102	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	110	Orang	150,000,000	0			0	0
2	08	02	102	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Perempuan, Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	11	Organisasi	415,000,000	231,636,150	11	Organisasi	229,096,037	100 98.90

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2	08	02	103		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi										
2	08	02	103	03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta pelatihan pengembangan KIE pemenuhan kualitas hidup perempuan	110 Orang		50,000,000	384,691,875	110 Orang		379,176,684	100	98.57
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif									
2	08	03	101		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
2	08	03	101	01	Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang di laksanakan	1	Dokumen	438,845,500	137,990,650	1	Dok	137,289,550	100	99.49
2	08	03	103		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan KewenanganProvinsi										
2	08	03	103	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Advokasi dan pendampingan kab/kota yang mengusulkan RumahAman	2	Kab/Kota	131,090,000	145,899,900	2	Kab/Kota	145,899,900	100	100
2	08	03	103	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Pelatihan SDM Lembaga penyedia layanan	100	Orang	256,100,000	76,976,450	100	Orang	66,426,450	100	88.29

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2	08	03	103	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	100	Orang	36,979,500	45,799,775	100	Orang	45,349,775	100	99.02
2	08	03	103	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia Layanan	2	Dokumen	45,215,000						
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga pra sejahtera I yang ditingkatkan kualitasnya									
2	08	04	101		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi										
2	08	04	101	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Pra Sejahtera yang mendapatkan pendampinga KG	60	KK	450,000,000	760,294,675	60	KK	743,860,102	100	97.84
2	08	04	101	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelompok perempuan yang dilatih ketrampilan UP2K	36	Kelompok	1,740,290,000	3,358,114,941	36	Kelompok	3,314,395,960	100	98.70
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender dan Anak									
2	08	05	101		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi										
2	08	05	101	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Anak	1	Dokumen	150,000,000	112,770,675	1	Dok	112,573,250	100	99.82
						Jumlah Dokumen Data Gender	1	Dokumen			1	Dok			

2	08	05	101	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Data terpilah Gender Anak yang termanfaatkan	1	Aplikasi	466,530,000	239,999,619	1	Aplikasi	238,265,750	100	99.28
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Persentase Kab/Kota yang Mengikuti Status KLA									
2	08	06	101		Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan Provinsi										
2	08	06	101	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	70	Orang	88,900,000	72,243,875	70	Orang	72,137,475	100	99.85
2	08	06	101	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pelebagaan pemenuhan hak anak	1	Laporan	133,400,000	72,588,650	1	Laporan	71,707,000	100	98.79
2	08	06	102		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi										
2	08	06	102	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terbentuknya Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	4	Orang	37,280,000	35,832,500	4	Orang	35,532,500	100	99.16
2	08	06	102	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak	190	Orang	122,317,000	262,644,850	190	Orang	261,364,782	100	99.51

2	08	06	102	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pertemuan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Ana	100	Orang	385,056,150	322,945,875	100	Orang	322,423,739	100	99.84
2	08	06	102	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100	Orang	100,000,000	14,386,225	100	Orang	14,386,225	100	100.00
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif									
2	08	07	101		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
2	08	07	101	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan, pencegahan dan fasilitasi perlindungan khusus anak	4	Dokumen	1,000,000,000	621,101,000	4	Dok	607,405,011	100	97.79
2	08	07	101	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	180	Orang	770,000,000	548,601,750	180	Orang	523,669,456	100	95.46

2	08	07	102		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi										
2	08	07	102	01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Kasus anak yang memerlukan perlindungankhusus yang tertangani	100	Persen	50,000,000	47,249,875	100	Persen	44,139,532	100	93.42
					U P T PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK										
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip OPD									
2	8	01	102		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
2	8	01	102	02	Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Laporan	220,400,000	21,000,000	12	Laporan	21,000,000	100	100
2	8	01	108		Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah										
2	8	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	24,360,000	21,800,000	12	Bulan	18,738,968	100	85.96
2	8	01	108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	1	Paket	125,170,000	188,908,000	1	Paket	188,442,887	100	99.75
2	8	01	109		Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah										
2	8	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	1	Paket	70,450,000	70,450,000	1	Paket	70,357,800	100	99.87
2	8	01	109	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan	1	Paket	7,750,000	7,750,000	1	Paket	7,750,000	100	100
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif									

2	08	03	102		Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah Kab/Kota										
2	08	03	102	01	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota	Tersedianya penjangkauan dan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak	1	tahun	261,880,000	361,432,000	1	tahun	359,122,571	100	99.36
2	08	03	102	02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	umlah kasus perempuan korban kekerasan yang tertangani	100	Persen	54,030,000	95,044,000	100	Persen	94,494,000	100	99.42
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan Komprehensif									
2	08	07	102		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi										
2	08	07	102	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus yang tertangani	100	Persen	42,970,000	80,000,000	100	Persen	79,680,000	100	99.60
							Jumlah		34,472,263,999	21,853,464,895			20,943,602,765		95,84

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah terbentuk sejak tahun 2017 yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta Pergub Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah dimana gambaran pelayanan kinerja OPD secara garis besar sesuai dengan target capaian kinerja RENSTRA OPD tahun 2021-2026. Untuk terwujudnya capaian sasaran kinerja program dan kegiatan pelayanan OPD yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja tahunan OPD perlu dilakukan pengkajian secara komprehensif sehingga dapat terukur pencapaian indikator kinerja yang dapat mendukung tugas dan fungsi pelayanan OPD. Dalam menetapkan indikator kinerja pelayanan OPD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah mempertimbangkan Indikator Kinerja.

Adapun hasil analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel. 2.2.

TABEL. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022 – 2023

NO	INDIKATOR	REALISASI CAPAIAN	TARGET RENSTRA DP3A		CATATAN ANALISIS	
		2022	2022	2023		2024
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	91,91	91,90	91,93	91,96	Melampaui Target
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	75,8	76	75,9	76	Melampaui target
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20	56,37	56,46	56,53	Tidak Mencapai Target
4	Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR	27,0	31,11	27,20	27,30	Tidak Mencapai Target
5	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	12	91,52	93,32	95,12	Tidak Mencapai Target
6	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0,012	0,02	0,02	0,02	Melampaui Target
7	Persentase Jumlah Tenaga Kerja di bawah Umur	5,59	28,33	26,33	24,33	Melampaui Target
8	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	53,70	97,12	97,48	97,84	Melampaui Target

9	Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	11,06	87.48	86,99	86,88	Tidak Mencapai Target
10	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	41,83	85	85	85	Tidak Mencapai Target
11	Persentase Anak Korban Kekerasan yang di tangani Instansi Terkait Provinsi	94,88	70	70	70	Melampaui Target

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas koordinasi dan sinkronisasi program-program pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah sehingga memiliki peranan dalam rangka membuka sudut pandang para stake holder mengenai perspektif gender dan anak serta mensosialisasikan pola pikir strategis dimana perempuan dan anak dapat dijadikan aset dan potensi penting dalam pembangunan. Untuk itu perlunya menganalisa isu-isu strategis dengan mempertimbangkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut:

1. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- a. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda. Dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan.
- b. Dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, masih terjadi netral gender dan terjadi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan.
- c. Masih ditemukannya peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak.
- d. Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan.
- e. Partisipasi angkatan kerja perempuan yang belum optimal
- f. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan, anak serta pemberdayaan gender
- g. Belum optimalnya data pembangunan yang terpilah menurut jenskkelamin, sehingga sulit dalam menemukenali masalah-masalah gender yang ada.
- h. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan.
- i. Masih rendahnya partisipasi perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, politik dan hukum

- j. Masih rendahnya partisipasi dan keterlibatan perempuan di bidang ketenagakerjaan yaitu di legislatif, eksekutif dan kelembagaan swasta

2. Perlindungan Perempuan dan Anak

- a. Tingginya angka kekerasan terhadap Perempuan dan anak serta KDRT yang dapat terpantau dari aplikasi SIMFONI PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang dapat diakses secara luas.
- b. Masih tingginya kasus tenaga kerja anak dibawah umur dan lemahnya koordinasi lintas sector.
- c. Peraturan perundang-undangan yang ada sebagian juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Kebutuhan tumbuh-kembang anak juga belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan partisipasi anak dalam proses pembangunan masih rendah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKP

Dalam pencapaian sasaran OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pencapaian target pelayanan adalah masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang memahami gender, belum optimalnya penanganan kasus KDRT, Trafiking dan kekerasan lainnya belum optimalnya jumlah kebijakan yang responsif gender dan anak.

Adapun yang dapat menjadi pendorong dalam pelaksanaan pencapaian pelayanan adalah adanya program-program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan manajemen dan peningkatan pemahaman dan kualitas hidup perempuan atau gender, peningkatan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak, peningkatan kebijakan yang responsive gender dan anak, melalui pelatihan, sosialisasi, pembinaan melalui pemberian bantuan modal usaha, advokasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi perempuan.

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD sebagaimana terurai dalam tabel. 2.3

TABEL. 2.3

**REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS KEBUTUHAN						
					Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan	
Capaian Program		Capaian Program														
Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2	8															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
2	8	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64 Indeks		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64 Indeks		
2	8	1	1.01			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				398,950,000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				427,462,000	
2	8	1	1.01	1	Provinsi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	16,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	30,000,000	
2	8	1	1.01	2	Provinsi	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	16,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	30,000,000	

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2	8	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	16,000,000							
2	8	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	16,000,000							
2	8	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	16,000,000							
2	8	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	30,000,000							
2	8	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	288,950,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lap evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun Jumlah Lap evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	1 Laporan 0 Laporan	367,462,000		

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2	8	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9,608,259,362	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9,530,267,911	
2	8	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	8,628,174,895	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	8,210,029,911
2	8	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	929,750,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,235,000,000
2	8	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10,000,000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	20,238,000
2	8	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	25,000,000
2	8	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	30,334,467	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen 0 Dokumen	40,000,000

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2	8	1	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				69,750,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				75,000,000	
2	8	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	69,750,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	75,000,000
												Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	
2	8	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				410,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				604,000,000	
2	8	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 Paket	3,000,000					
2	8	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	134,835,400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30,000,000
2	8	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	272,164,600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	574,000,000
												Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2	8	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				14,755,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				350,000,000	
2	8	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	855,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit 1 Unit	300,000,000	
2	8	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	13,900,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit 0 Unit	50,000,000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				550,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				421,000,000	
2	8	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20,000,000	
2	8	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	161,700,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan 0 Unit	170,000,000	

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2	8	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	80,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	56,000,000	
2	8	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	288,300,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	175,000,000	
												Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan		
2	8	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				300,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				480,000,000	
2	8	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	15,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	30,000,000	
2	8	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	285,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	250,000,000	
2	8	1	1.09	9						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200,000,000	

2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pengarusutamaan gender (IPG) Presentase Anggaran Responsif gender (ARG)	76 Indeks 86,46 % 50 %		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pengarusutamaan gender (IPG) Presentase Anggaran Responsif gender (ARG)	76 Indeks 86,46 % 50 %		
2	8	2	1.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			368,143,667	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			1,525,000,000			
2	8	2	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	85,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Kab. Parigi Moutong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	75,000,000	
												Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	0 Dokumen		
2	8	2	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	85,000,000						

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2	8	2	1.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	1 Perangkat Daerah	85,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	1 Perangkat Daerah	875,000,000
2	8	2	1.01	4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	1 Perangkat Daerah	113,143,667	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	0 Perangkat Daerah 1 Perangkat Daerah	575,000,000

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2	8	2	1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi				291,000,000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi				275,000,000
2	8	2	1.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	145,500,000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	212,500,000
2	8	2	1.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	1 Organisasi	145,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	0 Organisasi	62,500,000
											Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	1 Organisasi	
2	8	2	1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi				90,000,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi				575,000,000

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2	8	2	1.03	1	Advokasi Kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan propinsi		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	40,000,000					
2	8	2	1.03	2	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan propinsi		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	25,000,000	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan propinsi		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	500,000,000
2	8	2	1.03	3	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	25,000,000	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Kab. Parigi Moutong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	75,000,000
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Presentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	80 Persen		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Presentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	80 Persen	
2	8	3	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				300,326,449	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				260,000,000
2	8	3	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Parigi Moutong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	110,000,000

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2	8	3	1.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan propinsi	Jumlah Perangkat daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	54 Perangkat Daerah	200,326,449	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan propinsi	Jumlah Perangkat daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	54 Perangkat Daerah	150,000,000	
2	8	3	1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				150,000,000					
2	8	3	1.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	50 Orang	75,000,000					
2	8	3	1.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Layanan	75,000,000					
							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	120,000,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			240,000,000	
2	8	3	1.03	1					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	80,000,000

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2	8	3	1.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 orang	120,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toli Toli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 orang	80,000,000	
2	8	3	1.03	3					Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	2 Orang	80,000,000	
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase keluarga pra sejahtera I yang ditingkatkan kualitasnya	55 Persen	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase keluarga pra sejahtera I yang ditingkatkan kualitasnya	55 Persen		
2	8	4	1.01		Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga			505,359,526	Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga			1,270,000,000		
2	8	4	1.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	2 Perangkat Daerah	205,359,526	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasidan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	2 Perangkat Daerah 0 Perangkat Darah	150,000,000	

2	8	4	1.01	2	Pelaksanaan Komunikasi , informasi , Edukasi KG dan perlindungan Anak bagi keluarga kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi(KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Propivinsi yang Tersedia	1 Dokumen	150,000,000							
2	8	4	1.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Laporan	150,000,000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab.Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Poso, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab.Parigi Moutong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	0 Laporan	1,120,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Laporan

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2	8	4	1.02		Penguatan dan Pengembangan lembaga Penyedia Layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG			500,000,000						
2	8	4	1.02	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan propinsi	Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan provinsi yang mendapat advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	200,000,000						
2	8	4	1.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan propinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1 Orang	150,000,000						
2	8	4	1.02	3	Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	150,000,000						
2	8	4	1.03		Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah Kabupaten Kota			500,000,000	Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah Kabupaten Kota			150,000,000		
2	8	4	1.03	1	Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah propinsi dan lintas daerah kabupten / kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Layanan	500,000,000	Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah propinsi dan lintas daerah kabupten / kota		Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Layanan	150,000,000	

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase Data Gender dan Anak	70 Persen		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase Data Gender dan Anak	70 Persen		
2	8	5	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi				423,733,527	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi				475,000,000	
2	8	5	1.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	150,000,000	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Kab. Donggala, Banawa, Semua Kelurahan Kota Palu, Mantikulore, Semua Kelurahan Kab. Sigi, Sigi Biromaru, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	175,000,000	
2	8	5	1.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 Dokumen	273,733,527	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Poso, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 Dokumen 1 Dokumen	300,000,000	

2	8	6		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kab/Kota yang meningkat status KLA	29 Persen		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kab/Kota yang meningkat status KLA	29 Persen		
2	8	6	1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			295,846,296	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			200,000,000	
2	8	6	1.01	1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	25 Organisasi	150,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	25 Organisasi	100,000,000
										Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	0 Organisasi	
2	8	6	1.01	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danSinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	145,846,296	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danSinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen 0 Dokumen	100,000,000

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2	8	6	1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			300,000,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			745,000,000			
2	8	6	1.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	10 orang	50,000,000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	10 orang 0 Orang	105,000,000	
2	8	6	1.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	50,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen 0 Dokumen	425,000,000	
2	8	6	1.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	160,000,000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen 0 Dokumen	105,000,000	

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2	8	6	1.02	4	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsidan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40,000,000	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsidan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110,000,000	
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGANKHUSUS ANAK		Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan Komprehensif			PROGRAM PERLINDUNGANKHUSUS ANAK		Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan Komprehensif	65%		
2	8	7	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup DaerahProvinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	730,396,493	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak LingkupDaerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	260,000,000							
2	8	7	1.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasanterhadap Anak Kewenangan Provinsi	100 Organisasi	330,396,493	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Kab. Poso, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	100 Organisasi	130,000,000	

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2	8	7	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	400,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Poso, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	130,000,000	
											Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	0 Dokumen		
2	8	7	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			250,000,000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				115,000,000	
2	8	7	1.02	1	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	30 Orang	62,500,000	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan. Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan Pengaduan.	30 Orang 0 Orang	115,000,000	

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2	8	7	1.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Layanan	62,500,000						
2	8	7	1.02	3	Pengembangan komunikasi , informasi, edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi			62,500,000						
2	8	7	1.02	4	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan propinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jenjang Antar Lembaga Penyedia layananAnak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	62,500,000						
2	8	7	1.03	1	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan propinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 Laporan	100,000,000						
2	8	7	1.03	2	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan propinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	100,000,000						

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2	8	7	1.03	3	Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan propinsi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	100,000,000					
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (UPT)									
2	8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64 Indeks		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64 Indeks	
2	8	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				170,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				50,000,000
2	8	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	170,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	50,000,000
2	8	7	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				195,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,000,000
2	8	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	195,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	1 Laporan	100,000,000
												Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	1 Dokumen	

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2	8	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			50,000,000		
2	8	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	80,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	50,000,000	
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	65 %		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Presentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	65 %		
2	8	3	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			271,000,000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			150,000,000		
2	8	3	1.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	50 Orang	165,000,000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat.	50 Orang 0 Orang	70,000,000	
2	8	3	1.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	106,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi. Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi.	1 Dokumen 1 Layanan	80,000,000	

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2	8	7	1.02		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan Komprehensif	65 %		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan Komprehensif	65 %	
2	8	7	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			100,000,000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			100,000,000		
2	8	3	1.02	1	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan perlindungan Khusus kewenangan propinsi		Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	30 Orang	50,000,000	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan perlindungan Khusus kewenangan propinsi		Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	30 Orang	50,000,000
												Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	0 Orang	
2	8	3	1.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Layanan	30,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Layanan	30,000,000
												Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	0 Layanan	

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2	8	3	1.02	3	Pengembangan komunikasi, informasi, edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan propinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	10,000,000	Pengembangan komunikasi, informasi, edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan propinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	10,000,000
									Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	0 Dokumen		
2	8	3	1.02	4	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan propinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	10,000,000	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan propinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	10,000,000
									Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	0 Dokumen		
							TOTAL	32,032,765,320				18,427,729,911

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Permasalahan rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda. Dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan. Angka yang menjadi basis bagi pengambilan keputusan, penyusunan program dan pembuatan kebijakan, tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan dan laki-laki sehingga kebijakan, program dan lembaga yang dirancang menjadi netral gender dan menimbulkan kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan.
2. Persoalan lain adalah masih ditemukannya peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak. Perangkat hukum pidana yang ada belum cukup lengkap dalam melindungi setiap individu, salah satu diantaranya adalah perlindungan terhadap perdagangan orang. Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang ada sebagian juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Kebutuhan tumbuh-kembang anak juga belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan partisipasi anak dalam proses pembangunan masih rendah.
3. Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan. Demikian pula pemahaman akan pentingnya anak sebagai generasi penerus bangsa masih harus ditingkatkan. Keterbatasan pemahaman itu juga terjadi di antara para perencana dan pelaksana pembangunan yang memperlambat upaya-upaya mengintegrasikan konsep tersebut ke dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan.
4. belum optimalnya tersedianya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit dalam menemukannya masalah-masalah gender yang ada. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas

Tujuan dan Sasaran Renja OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari

tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi 2021-2026, dengan uraian sebagai berikut:

3.2.1. Tujuan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

3.2.2. Sasaran Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

Tabel . 3.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak									
			1.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	persen	75	78,95	80,38	81,81	83,24
			1.2	Indeks Pembangunan Anak (IPA)	persen	-	53,40	53,74	54,08	54,42
		Meningkatnya Kesetaraan Gender	2.1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	persen	-	17,05	17,10	17,15	17,20
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak	3.1	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	persen	-	52,85	52,94	53,03	53,12
			3.2	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	persen	-	60,60	62	63,40	64,80

3.3. Program dan Kegiatan Dinas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam urusan wajib non pelayanan dasar di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun dengan dikeluarkannya Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang berimbas pada perubahan struktur program kegiatan pada tahun anggaran 2023.

Untuk mendukung tercapainya pembangunan di daerah serta pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah telah merencanakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2023 yang terdiri dari 7 Program, 20 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019, Adapun Program dan Kegiatan prioritas sebagaimana terlampir pada Tabel : 3.2.

TABEL: 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah																	
Provinsi Sulawesi Tengah																	
Tahun 2023																	
Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah																	
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah																	
Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					20,598,779,911				23,688,596,898			
2	8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					13,022,300,436				14,975,645,504			
2	8	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					423,553,600				487,086,640			
2	8	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sakip	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Timur,	77 Persen	1 Dokumen	3 Laporan	35,542,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sakip	77 Persen	40,873,300
2	8	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sakip	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Timur	77 Persen	1 Dokumen	3 laporan	33,419,600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Anggaran Tahun Sebelumnya	Sakip	77 Persen	38,432,540

2	8	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sakip	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 Persen	1 Dokumen	3 Laporan	354,592,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sakip	77 Persen	407,780,800
2	8	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,731,381,909			11,191,089,196	
2	8	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Realisasi anggaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Timur	97 Persen	12 Bulan	5 Laporan	8,210,030,359	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Realisasi Anggaran	97 Persen	9,441,534,913
2	8	1	1	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Timur	97 Persen	1 Dokumen	5 Laporan	1,309,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Realisasi Anggaran	97 Persen	1,505,614,500
2	8	1	1	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Timur	97 Persen	1 Dokumen	5 Laporan	92,969,700	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Anggaran	97 Persen	106,915,155
2	8	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Realisasi anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua kab/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	97 Persen	3 laporan	5 Laporan	69,151,850	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Anggaran	97 Persen	79,524,628

2	8	1	1	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Timur	97 Porsen	1 Dokumen	5 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Anggaran	97 Porsen	57.500.000
2	8	1	1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								127,540,538				146.671.619
2	8	1	1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Timur	85 porsen	134 Buah	1 Laporan	127,540,538	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 porsen	146,671,619
2	8	1	1		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,349,741,425				1,552,202,639
2	8	1	1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Timur	85 Porsen	1 paket	2 Laporan	32,114,325	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Porsen	36.931.474
2	8	1	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua kab/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	85 Porsen	1 laporan	2 Laporan	1,317,627,100	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Porsen	1.515.271.165
2	8	1	1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								337,675,064				388.326.324

2	8	1	1	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Timur	85 Persen	3 unit	2 Laporan	68,888,834	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Anggaran Tahun Sebelumnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Persen	79.222.159
---	---	---	---	---	---	----------------------------------	--	---	-------------------------------------	-----------	--------	-----------	------------	---	----------------------------------	-----------	------------

2	8	1	1	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Timur	85 Persen	1 Unit	2 Laporan	268,786,230	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Persen	309.104.165
2	8	1	1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								345,241,700			397.027.956	
2	8	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Persen	1 Laporan	4 Laporan	34,584,900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Persen	39.772.635
2	8	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Timur	85 Persen	1 Laporan	4 Laporan	169,994,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Persen	195.493.100

2	8	1	1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Timur	85 Persen	1 Laporan	4 Laporan	26,863,770	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Persen	30.893.336
2	8	1	1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Timur	85 Persen	1 Laporan	4 Laporan	113,799,030	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Persen	130.868.885
2	8	1	1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							707,166,200				813.241.130	
2	8	1	1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Timur	85 Persen	38 Unit	3 Laporan	22,336,200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Persen	25,686,630
2	8	1	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Timur	85 Persen	38 Unit	3 Laporan	324,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Persen	373,232,500
2	8	1	1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Besusu Timur	85 Persen	3 Unit	3 Laporan	360,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Persen	414.322.000

2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					2,026,696,650				2,370,701,149		
2	8	2	1		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi					762,393,650				876,752,698		
2	8	2	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi 7 Prasyarat PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Kab. Parigi Moutong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,38 Persen	1 Dokumen	3 Laporan	145,847,350	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi 7 Prasyarat PUG 15,38 Persen	167,724,453
2	8	2	1	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi 7 Prasyarat PUG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,38 Persen	20 OPD	3 Laporan	322,402,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi 7 Prasyarat PUG 15,38 Persen	370,763,105

2	8	2	1	4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi 7 Prasyarat PUG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Jumlah Laporan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,38 Persen	20 OPD	3 Laporan	294,143,600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi 7 Prasyarat PUG	15,38 Persen	338,265,140
2	8	2	1		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi								789,367,250			907,772,338	
2	8	2	1	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Persentase Kursi yang diduduki Perempuan di DPR Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi 7 Prasyarat PUG	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,67 Persen 15,38 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	402,322,150	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Kursi yang diduduki Perempuan di DPR	30,67 Persen	462,670,473

2	8	2	1	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Persentase Kursi yang diduduki Perempuan di DPR Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi 7 Prasyarat PUG	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,67 Persen 15,38 Persen	20 OPD	2 Dokumen	62,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Kursi yang diduduki Perempuan di DPR	30,67 Persen	445,101,865
2	8	2	1		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi							474,935,750				586,176,113	
2	8	2	1	2	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi 7 Prasyarat PUG	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah Laporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	-	15,38 Persen	1 Laporan	2 Laporan	183,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi 7 Prasyarat PUG	15,38 Persen	211,312,500

2	8	2	1	3	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi 7 Prasyarat PUG	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Jumlah Laporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Kab. Parigi Moutong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,38 Persen	1 Laporan	2 Laporan	291,185,750	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi 7 Prasyarat PUG	15,38 Persen	334,863,613
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								500,000,000		775,000,000		
2	8	3	1		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								260,000,000		299,000,000		
2	8	3	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten yang membentuk DRPPA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Parigi Moutong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,67 persen	1 Dokumen	2 Laporan	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Kabupaten yang membentuk DRPPA	16,67 persen	126,500,000
2	8	3	1	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten yang membentuk DRPPA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,67 persen	25 OPD	2 Laporan	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Kabupaten yang membentuk DRPPA	16,67 persen	172,500,000

2	8	3	1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi						240,000,000				276,000,000			
2	8	3	1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten yang membentuk DRPPA	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,67 Persen	1 Laporan	3 Laporan	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Kabupaten yang membentuk DRPPA	16,67 Persen	92,000,000
2	8	3	1	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten yang membentuk DRPPA	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah Laporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. ToliToli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,67 Persen	30 orang	3 Laporan	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Kabupaten yang membentuk DRPPA	16,67 Persen	92,000,000
2	8	3	1	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten yang membentuk DRPPA	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Jumlah Laporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,67 Persen	30 orang	3 Laporan	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Kabupaten yang membentuk DRPPA	16,67 Persen	92,000,000

2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					2,817,283,150				3,239,875,623			
2	8	4	1		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi					2,778,783,150				3,195,600,623			
2	8	4	1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Keluarga	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,29 persen	20 Stekholder	2 Laporan	373,390,650	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Keluarga	31,29 persen	429,399,248
2	8	4	1	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Poso, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Parigi Moutong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,29 persen	1 Laporan	2 Laporan	2,405,392,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Keluarga	31,29 persen	2,766,201,375

2	8	4	1	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota								38,500,000					44,275,000	
2	8	4	1	3	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Keluarga	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah KerjanyaLingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,29 persen	1 Laporan	1 Laporan	38,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Keluarga	31,29 persen	44,275,000
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								475,000,000					546,250,000		
2	8	5	1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi								475,000,000					546,250,000	
2	8	5	1	1	Penyediaan Data Gender dan AnakProvinsi	Persentase Data Gender & Anak Yang Di Publikasikan Persentase Ketersediaan Data Anak Persentase Ketersediaan Data Gender	Jumlah dokumen data gender dan anak provinsi yang teredia	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam KelembagaanData di Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Donggala, Banawa, Semua Kelurahan Kota Palu, Mantikulore, Semua Kelurahan Kab. Sigi, Sigi Biromaru, Semua Kelurahan	50 persen 41,03 Persen 40,40 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Data Gender & Anak Yang Di Publikasikan Persentase Ketersediaan Data Anak Persentase Ketersediaan Data Gender	50 persen 41,03 Persen 40,40 Persen	201,205,000
2	8	5	1	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam KelembagaanData Provinsi	Persentase Data Gender & Anak Yang Di Publikasikan Persentase Ketersediaan Data Anak Persentase Ketersediaan Data Gender	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam KelembagaanData di Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Poso, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen 41,03 Persen 40,40 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Data Gender & Anak Yang Di Publikasikan Persentase Ketersediaan Data Anak Persentase Ketersediaan Data Gender	50 persen 41,03 Persen 40,40 Persen	345,000,000

2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						924,999,900				1,063,749,887		
2	8	6	1		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi						403,952,150				464,544,973		
2	8	6	1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota yang ditetapkan sebagai KLA	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah Dokumen Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,08 Persen	7 Organisasi	2 Dokumen	100,126,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Kab/Kota yang ditetapkan sebagai KLA	23,08 Persen	115,145,648
2	8	6	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota yang ditetapkan sebagai KLA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,08 Persen	5 Dokumen	2 Dokumen	303,825,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Kab/Kota yang ditetapkan sebagai KLA	23,08 Persen	349,399,325

2	8	6	1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						521,047,750				599,204,914			
2	8	6	1	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota yang di tetapkan sebagai KLA	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,08 persen	40 Anak	4 Dokumen	98,040,050	PENDAPATAN DAERAH ASLI (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Kab/Kota yang di tetapkan sebagai KLA	23,08 persen	112,746,058
2	8	6	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota yang di tetapkan sebagai KLA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,08 persen	2 Dokumen	4 Dokumen	213,798,000	PENDAPATAN DAERAH ASLI (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Kab/Kota yang di tetapkan sebagai KLA	23,08 persen	245,867,700

2	8	6	1	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota yang di tetapkan sebagai KLA	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,08 persen	3 Dokumen	4 Dokumen	111,959,950	PENDAPATAN DAERAH ASLI (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Kab/Kota yang di tetapkan sebagai KLA	23,08 persen	128,753,943
2	8	6	1	4	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota yang di tetapkan sebagai KLA	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,08 persen	2 Dokumen	4 Dokumen	97,249,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Kab/Kota yang di tetapkan sebagai KLA	23,08 persen	111,837,213

2	8	7				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				832,499,775			957,374,742				
2	8	7	1			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				693,749,725			797,812,184				
2	8	7	1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten yang membentuk PATBM	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Poso, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,08 persen	30 Organisasi	2 Laporan	300,000,125	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Kabupaten yang membentuk PATBM	23,08 persen	345,000,144
2	8	7	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten yang membentuk PATBM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Poso, Semua Kecamatan,	23,08 persen	1 Dokumen	2 Laporan	393,749,600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Kabupaten yang membentuk PATBM	23,08 persen	452,812,040

2	8	7	1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi						75,000,050				86,250,058			
2	8	7	1	1	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten yang membentuk PATBM	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,08 Persen	30 Anak	1 Laporan	75,000,050	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Kabupaten yang membentuk PATBM	23,08 persen	86,250,058

2	8	7	1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						63,750,000		73,312,500				
2	8	7	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten yang membentuk PATBM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,08 persen	1 Dokumen	1 Laporan	63,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase Kabupaten yang membentuk PATBM	73,312,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah																	
Provinsi Sulawesi Tengah																	
Tahun 2023																	
Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah																	
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0001 UPT Perlindungan Perempuan dan Anak																	
Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									822,517,500			
2	8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									169,926,300			
2	8	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									36,857,500			
2	8	1	1	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 Persen	1 Dokumen	1 laporan	32,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Realisasi Anggaran	97 Persen	36,857,500
2	8	1	1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									104,624,000	81,870,800		
2	8	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Persen	1 Laporan	1 Laporan	104,624,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Persen	81,870,800

2	8	1	1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					76,570,000				88,055,500			
2	8	1	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Persen	2 Unit	1 Laporan	76,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Persen	88,055,500
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					330,354,400				419,032,860			
2	8	3	1		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					330,354,400				419,032,860			
2	8	3	1	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Perempuan Dan TPPO Yang Mendapat Layanan Komprehensif	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 persen	50 Orang	2 Laporan	184,716,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Penanganan Perempuan Dan TPPO Yang Mendapat Layanan Komprehensif	65 persen	250,870,200

2	8	3	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Persentase Penanganan Perempuan Dan TPPO Yang Mendapat Layanan Komprehensif	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toli Toli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Poso, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Parigi Moutong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 persen	1 Dokumen	2 laporan	145,638,400	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase Penanganan Perempuan Dan TPPO Yang Mendapat Layanan Komprehensif	65 persen	168,162,660
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								136,851,600			156,700,840	
2	8	7	1		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi								136,851,600			156,700,840	
2	8	7	1	1	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan perlindungan Khusus kewenangan propinsi	Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 Persen	30 Anak	2 Laporan	64,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	65 Persen	74,738,500

2	8	7	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah Laporan Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 Persen	1 Laporan	2 Laporan	71,861,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik)	Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	65 Persen	81,962,340
TOTAL													21,279,229,911		24,471,114,398		

BAB IV**PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan penjabaran pelaksanaan dari Rencana Strategi (RENSTRA) 2021-2026. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026.

Dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang memusatkan pada pencapaian arah tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan yang mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian target pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2023 yang wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Disamping itu pula pelaksanaan program dan kegiatan mengisyaratkan keterpaduan dan sinkornisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu instansi dan antar instansi terkait, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah.

Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2023 ini disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 27 April 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. ZUBAIR, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19701009 199003 1 003